

Katalog : 4601009.53

# RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009 - 2017



**RINGKASAN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
2009 - 2017**



# **RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009-2017**

**ISSN** : 2528-2131  
**Katalog** : 4601009,53  
**No. Publikasi** :  
**Ukuran buku** : 19,05 cm x 25,40 cm  
**Halaman** : vi + 33

**Naskah** : Bidang Statistik Sosial

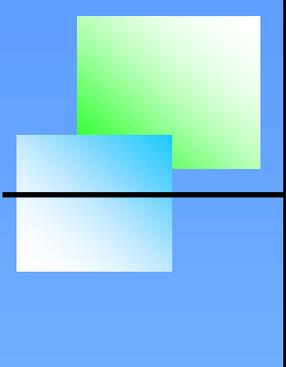
**Penyunting** : Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit** : Bidang Statistik Sosial

**Diterbitkan oleh** : ©BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Dicetakoleh** : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial  
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



## Kata Pengantar

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009 dan sekaligus sebagai *benchmark* penyusunan IDI. Oleh karena itu, publikasi ini berupaya menyajikan data IDI sejak 2009 hingga tahun 2017 agar dapat melihat perkembangan IDI sesuai komponen IDI 2009 sekaligus melihat perubahan dua indikator sejak tahun 2015 sebagai upaya penyempurnaan penyusunan IDI. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dikoordinir oleh Bappenas, didukung oleh UNDP, Kemendagri, BPS dan Bappeda.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui *review* surat kabar dan *review* dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Terbitnya buku ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Ringkasan IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2017 disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kupang, Desember 2018  
Kepala BPS Provinsi NTT



Maritje Pattiwaellapia



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
- Apakah IDI itu.....	1
- Tujuan dan Metodologi Pengumpulan data IDI.....	2
- Tahapan Penghitungan IDI.....	3
- Review Surat Kabar dan Dokumen.....	4
- Focus Group Discussion (FGD).....	5
- Wawancara Mendalam (In-dept Interview).....	6
- Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	7
- Perkembangan IDI di NTT 2009-2017.....	8
- Perkembangan Nilai Indeks setiap Aspek.....	9
- Perkembangan Nilai Indeks setiap Variabel.....	11
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Kebebasan Sipil.....	14
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Hak-Hak Politik.....	16
- Perkembangan Skor Indikator –Indikator Aspek Lembaga Demokrasi.....	20
- Keterbandingan IDI NTT Tahun 2016-2017.....	22
- Lampiran .....	25



Apakah IDI itu?

## Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

*“Indikator komposit yang mengukur kondisi demokrasi provinsi dan menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia”*

### Prinsip Dasar Penyusunan IDI

- IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi
  - IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi
  - IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat
  - IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil, sejahtera
- IDI sebagai alat ukur objektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia
  - Konsep Demokrasi maupun metode pengukurannya, mempertimbangkan kekhasan persoalan yang ada Indonesia

Dua karakteristik utama dari praktik demokrasi diantaranya:

1. Pertama: telah terjadi perluasan peran masyarakat (society)
2. Kedua: reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara massif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru

## Tujuan Penghitungan IDI

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari hasil tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti. Dengan demikian, pengukuran ini akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi. Hasil ini akan bermanfaat untuk beberapa hal, *pertama*, hasil dari pengukuran IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. *Kedua*, bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, khususnya pada aspek atau variabel atau indikator yang masih kurang.

## Metode Pengumpulan Data IDI

IDI menggunakan metode triangulasi yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang akan didapat dari metode yang lain.

Metode pengumpulan data dikelompokkan dalam 2 pendekatan yaitu :

### ❑ **Pendekatan kuantitatif**

Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen, sebagai rujukan awal dan sumber data utama.

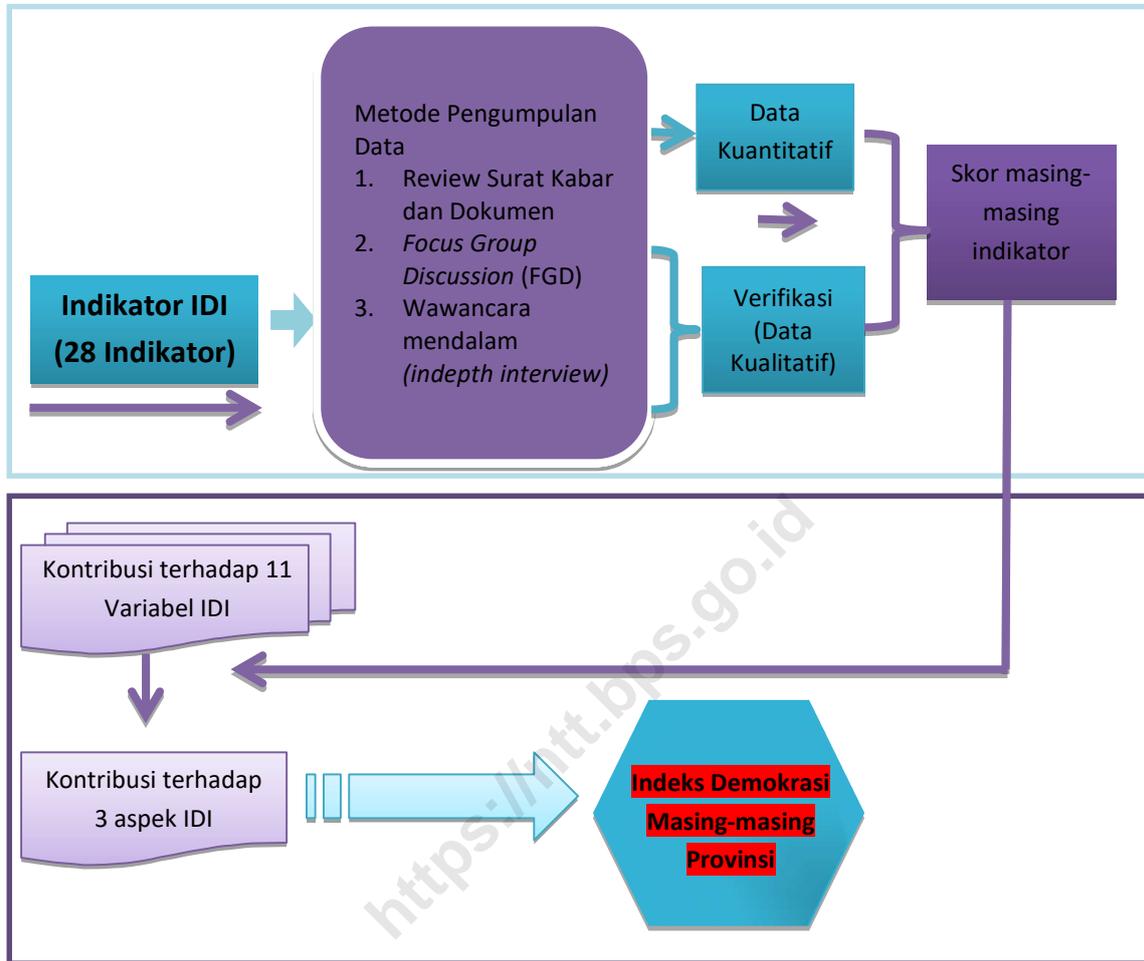
### ❑ **Pendekatan kualitatif**

Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Mendalam (WM).



## TAHAPAN PENGHITUNGAN IDI

Gambar 1. Alur Penghitungan IDI



### Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Buruk, lebih kecil dari 60

## Review Surat Kabar dan Review Dokumen

### Review Surat Kabar

Dalam melakukan review surat kabar, terlebih dahulu ditentukan salah satu surat kabar terpilih di setiap provinsi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan surat kabar diantaranya independensi dan oplah terbesar. Surat Kabar yang saat ini memenuhi hal tersebut adalah SKH Pos Kupang pada periode 1 Januari – 31 Desember tiap tahunnya.

- Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007
- Ditentukan berdasarkan:
  - a. Oplah terbesar
  - b. Independensi
- IDI NTT menggunakan surat kabar harian Pos Kupang.

### Review Dokumen

- Jenis dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang masih berlaku.

contoh: perda, pergub, perbup/perwali, surat kepala dinas, dll

Catatan administrasi resmi, seperti jumlah anggota DPRD terpilih jenis kelamin dari Sekretariat Dewan, kepengurusan partai politik terpilih jenis kelamin, data kegiatan kaderisasi dari partai politik, dll.

## FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

### Tujuan FGD IDI

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan review surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data review surat kabar dan dokumen.

### Peserta FGD

1. Merupakan sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator.
2. Mewakili profesi, kelompok, pengalaman, pengetahuan, jabatan, atau yang dianggap relevan lainnya.

### Pelaksanaan FGD

FGD dilaksanakan dua hari, dengan rincian:

- Hari I : Kebebasan Sipil
- Hari II : Hak-hak Politik dan Kinerja Institusi Demokrasi.

### Wawancara Mendalam (In-Dept Interview)

- Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD.
- Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya.
- Wawancara mendalam dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD.

Narasumber wawancara mendalam adalah orang-orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI.

<https://ntt.bps.go.id>

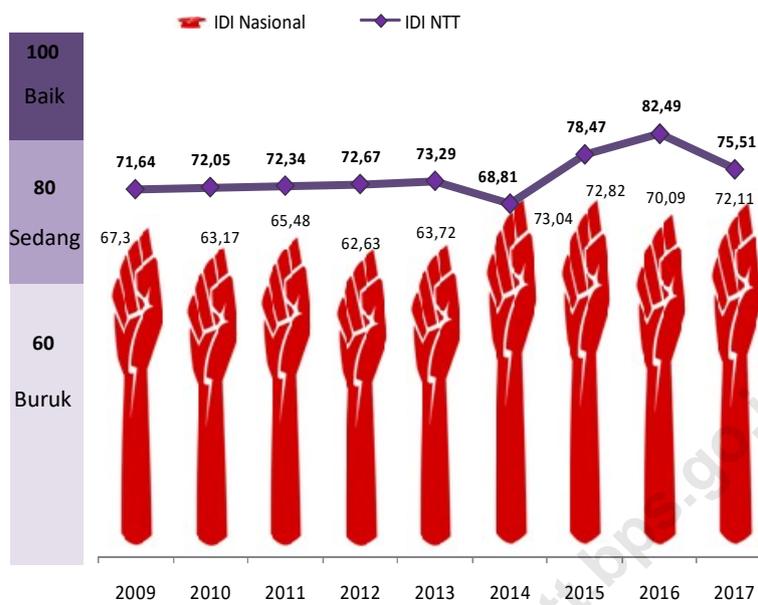
## Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (3 Aspek, 11 Variabel, 28 Indikator)

Aspek (1)	Variabel&Indikatornya (2)	Ket (3)
<b>ASPEK KEBEBASAN SIPIL</b>	<b>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat</b>	Variabel 1
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Indikator 1
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Indikator 2
	<b>Kebebasan Berpendapat</b>	Variabel 2
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	Indikator 3
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	Indikator 4
	<b>Kebebasan Berkeyakinan</b>	Variabel 3
	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agama	Indikator 5
	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	Indikator 6
	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agamanya	Indikator 7
	<b>Kebebasan dari Diskriminasi</b>	Variabel 4
	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 8
	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 9
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya	Indikator 10	
<b>ASPEK HAK-HAK POLITIK</b>	<b>Hak Memilih dan Dipilih</b>	Variabel 5
	Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	Indikator 11
	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	Indikator 12
	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	Indikator 13
	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	Indikator 14
	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	Indikator 15
	<b>Partisipasi politik, pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan</b>	Variabel 6
	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	Indikator 16
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	Indikator 17	
<b>ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI</b>	<b>Pemilu yang bebas dan adil</b>	Variabel 6
	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	Indikator 18
	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	Indikator 19
	<b>Peran DPRD</b>	Variabel 6
	Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD	Indikator 20
	Persentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan	Indikator 21
	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	Indikator 22
	<b>Peran parpol</b>	Variabel 6
	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	Indikator 23
	Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol di tingkat propinsi	Indikator 24
	<b>Peran birokrasi pemda</b>	Variabel 10
Kebijakan Pejabat Pemerintah yang dinyatakan bersalah	Indikator 25	
Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah	Indikator 26	
<b>Peradilan yang independen</b>	Variabel 11	
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	Indikator 27	
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	Indikator 28	

## Perkembangan IDI NTT Tahun 2009-2017

Grafik 1

### Perkembangan IDI NTT dan IDI Nasional Tahun 2009-2017



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

Kinerja demokrasi NTT dalam perspektif IDI sepanjang tahun 2009-2017, nilainya berfluktuatif terlihat dari tahun 2016 berhasil mencapai nilai IDI NTT sebesar 82,49, nilai IDI tersebut kembali menurun menjadi 75,51 di tahun 2017. Tahun 2016 menjadi periode pertama capaian tingkat demokrasi di Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori “baik”.

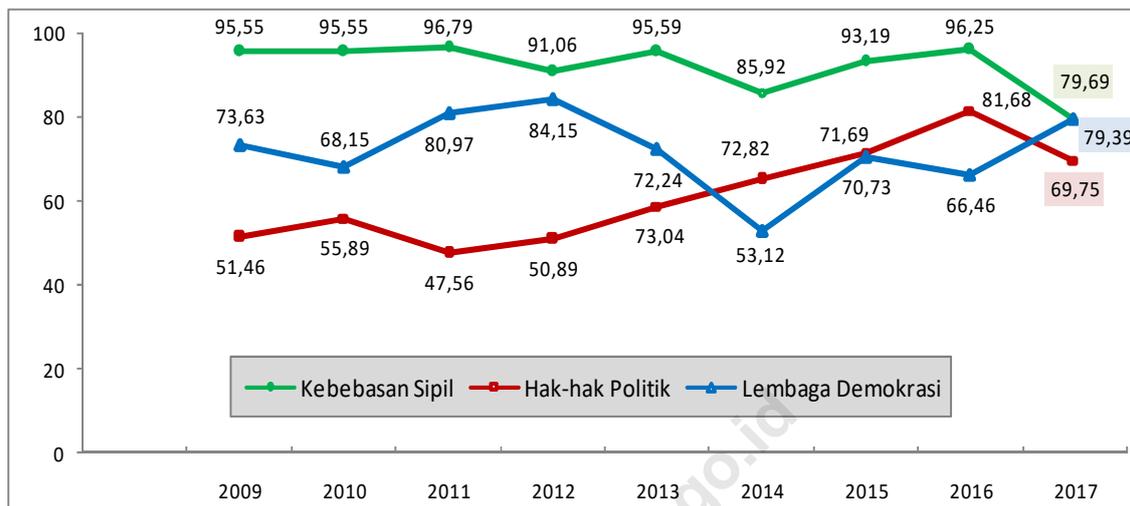
Nilai IDI NTT mengalami penurunan indeks dari 82,49 berkategori baik, menjadi 75,51 (berkategori sedang). Dari Grafik .1 di atas, dapat terlihat bahwa nilai IDI NTT meningkat dari tahun ke tahun dan selalu lebih tinggi dibandingkan IDI nasional, kecuali pada tahun 2014.

Jika melihat *trend* IDI NTT yang selalu meningkat dibandingkan dengan *trend* IDI nasional yang berfluktuasi, mencerminkan bahwa demokrasi di NTT cenderung membaik dibandingkan kondisi secara nasional. Hal ini juga diperkuat dengan perhatian pemerintah NTT terhadap kondisi demokrasi NTT dengan memasukkan IDI NTT kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Provinsi NTT merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memasukkan IDI ke dalam RPJMD. Dengan demikian, gambaran grafik di atas sejalan dengan perhatian pemerintah Provinsi NTT dalam menjadikan IDI NTT sebagai target capaian dalam RPJMD.

## Perkembangan Nilai Indeks Aspek IDI NTT Tahun 2009-2017

**Grafik 2.**

**Perkembangan Nilai Indeks Aspek IDI NTT Tahun 2009-2017**



Sumber data: BPS Provinsi NTT

Memahami kondisi demokrasi di Provinsi NTT yang cenderung meningkat bukan hanya persoalan angka yang semakin membaik. Namun, IDI NTT juga menunjukkan perbedaan dan dinamika capaian antar aspek yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara demokrasi. Jika melihat Grafik. 2 di atas, dari ketiga aspek pembangun IDI di Provinsi NTT sepanjang tahun 2009-2017, masing-masing menunjukkan nilai indeks yang berfluktuasi, sejalan dengan demokrasi yang memang bersifat dinamis.

Sepanjang periode 2009-2017, nilai Indeks Kebebasan Sipil terhadap nilai IDI NTT merupakan yang paling besar jika dibandingkan Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Masih dalam periode waktu tersebut, dari sisi Aspek Kebebasan Sipil, nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 96,79 dan terendah pada tahun 2017 sebesar 79,69. Dalam rentang nilai tersebut, menggambarkan bahwa kebebasan sipil di Provinsi NTT selalu dalam kategori baik sampai tahun 2016 akan tetapi mengalami sedikit penurunan di tahun 2017. Ini menunjukkan terlaksananya peran negara lingkup Provinsi NTT cukup baik dalam

menjamin kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan dan terbebas dari diskriminasi.

Jika melihat capaian nilai indeks Aspek Hak-hak Politik dalam Grafik 2, *trend* aspek ini mulai menunjukkan perubahan yang baik sejak tahun 2012 dengan *trend* nilai indeks yang meningkat hingga tahun 2016 akan tetapi mengalami penurunan nilai indeks di tahun 2017. Peningkatan nilai indeks dari tahun 2012 – 2016 tersebut menggambarkan kemajuan pesat di Provinsi NTT dalam mewujudkan hak-hak politiknya baik dari variabel hak memilih dan dipilih maupun partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nilai indeks dari kategori buruk selama tahun 2009-2013 dan mampu mencapai kategori baik hingga tahun 2016 ini. Nilai indeks terendah terjadi pada tahun 2011, dengan nilai indeks sebesar 47,56 dan nilai indeks tertinggi di tahun 2016 sebesar 81,68.

Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, di tahun 2017 nilai indeks lembaga demokrasi naik sebesar 12,93 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *Trend* indeks ini sepanjang periode tersebut memang berfluktuasi. Bahkan nilai indeks aspek lembaga demokrasi pernah berada pada kategori buruk pada tahun 2014 dengan nilai indeks sebesar 53,12. Nilai indeks tertinggi aspek ini terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 84,15. Perlu upaya yang serius bagi lembaga-lembaga demokrasi untuk mampu setara dengan Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik dalam mencapai tingkatan demokrasi yang lebih baik.

Secara umum, variabel-variabel dalam IDI NTT 2017 menghasilkan nilai indeks yang bervariasi. Nilai indeks variabel tertinggi terdiri dari variabel Peran Partai Politik dan Peran Peradilan yang Independen, dengan nilai indeks masing-masing sebesar 100. Variabel ini tentunya memberi andil paling besar terhadap nilai IDI NTT.

Berbeda dengan variabel dengan capaian nilai indeks terendah dalam hasil IDI NTT 2017 yakni, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, dengan nilai indeks sebesar 12,50. Variabel ini menjadi salah satu faktor penyebab turunnya nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil. Hal ini sejalan dengan penurunan nilai indeksnya yang sangat signifikan, yakni sebesar 87,50 poin terhadap nilai indeks pada tahun 2016 (100,00). Akibatnya, secara kualitas kebebasan berkumpul dan berserikat ini juga mengalami

pergeseran dari kategori baik pada tahun 2016 merosot tajam menjadi kategori buruk di tahun 2017.

Perkembangan Nilai Indeks 11 Variabel  
IDI NTT Tahun 2016-2017

**Tabel 1**  
**Nilai Indeks 11 Variabel IDI NTT Tahun 2016-2017**

No	Nama Variabel	2016	2017	Selisih
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100.00	12.50	-87.50
II	Kebebasan Berpendapat	100.00	50.00	-50.00
III	Kebebasan Berkeyakinan	95.01	96.26	1.25
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	96.53	74.38	-22.15
V	Hak Memilih dan Dipilih	74.24	73.75	-0.49
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	89.13	65.76	-23.37
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	97.47	97.47	0.00
VIII	Peran DPRD	38.32	61.63	23.30
IX	Peran Partai Politik	33.31	100.00	66.69
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	65.35	44.21	-21.14
XI	Peran Peradilan yang Independen	100.00	100.00	0.00

*Sumber data: BPS Provinsi NTT*

Dari tabel 1, terlihat bahwa penurunan indeks tidak hanya terjadi pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang turun sebesar 87,50 poin, akan tetapi variabel lainnya juga menunjukkan penurunan diantaranya Kebebasan berpendapat turun sebesar 50 poin, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan turun sebesar 23,37 poin, Kebebasan dari Diskriminasi turun 22,15 poin, disusul penurunan Peran Birokrasi dan Pemerintahan Daerah serta variabel Hak Memilih dan Dipilih masing-masing sebesar 21,14 poin dan 0,49 poin.

Sebagai bahan rujukan bagi penyelenggara demokrasi, khususnya bagi aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi, perlu menggarisbawahi variabel yang terdapat pada tabel 1 tersebut. Dimana, terdapat dua variabel yang nilai indeksnya sangat kecil dan termasuk dalam kategori buruk, terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat dengan nilai indeks sebesar 12,50 dan variabel peran birokrasi dan pemerintah daerah sebesar 44,21.

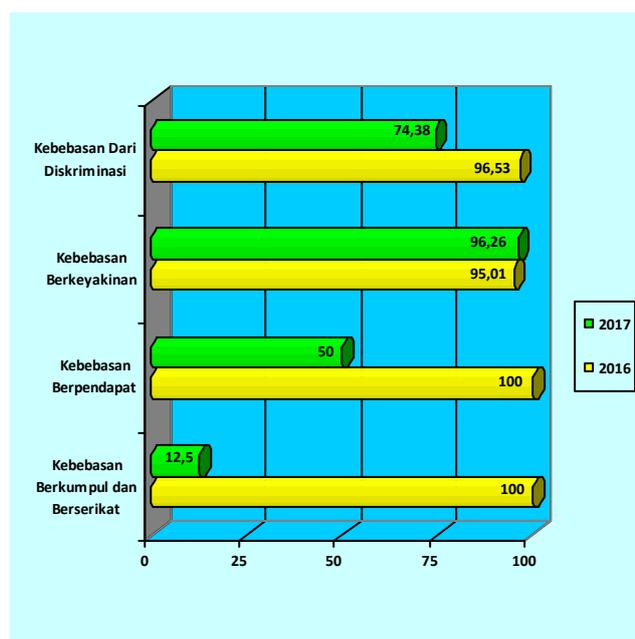
Dengan demikian dari 11 variabel, jumlah variabel yang mengalami peningkatan nilai indeks dalam IDI NTT Tahun 2017 ada sebanyak 3 variabel dan yang stagnan nilainya ada sebanyak 2 variabel. Peningkatan nilai indeks tertinggi selama tahun 2016-2017 dicapai oleh variabel Peran Partai Politik (meningkat 66,69 poin dari tahun sebelumnya dan mencapai nilai indeks 100). Selanjutnya, variabel Peran DPRD meningkat sebesar 23,30 poin dan variabel Kebebasan Berkeyakinan meningkat sebesar 1,25 poin dari angka 95,01 di tahun 2016 menjadi 96,26 tahun 2017.

Peningkatan nilai indeks tertinggi pada variabel Peran Partai Politik dan Peran DPRD memberikan andil yang besar pada peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas pada Aspek Lembaga Demokrasi.

### Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel Aspek Kebebasan Sipil IDI NTT Tahun 2016-2017

Dari Grafik 3, dapat dilihat bahwa nilai capaian indeks Aspek Kebebasan Sipil hingga tahun 2017, sebesar 79,69 disumbang oleh empat variabel yang terdiri dari Kebebasan berkumpul dan berserikat (12,50), Kebebasan berpendapat (50), Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (96,26), serta Kebebasan dari Diskriminasi (74,38)

**Grafik 3**  
**Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel**  
**Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016-2017**



Sumber data: BPS Provinsi NTT

Dari empat variabel dalam aspek kebebasan sipil hanya satu variabel saja yang mengalami kenaikan pada periode 2016-2017 yaitu variabel Kebebasan berkeyakinan sedangkan tiga variabel lainnya mengalami penurunan nilai indeks. Variabel Kebebasan berkeyakinan naik sebesar 1,25 poin dari tahun sebelumnya sedangkan variabel Kebebasan dari diskriminasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat turun berturut-turut sebesar 22,15 poin; 50,00 poin dan 87,50 poin.

Capaian nilai indeks variabel-variabel pada aspek kebebasan sipil yang belum mencapai nilai indeks 100 dan bahkan tiga variabel menunjukkan penurunan mengindikasikan bahwa masih ada kejadian yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat. Dan juga masih adanya hambatan dalam menjalankan ibadah dan diskriminasi dalam melakukan kegiatan dari suatu profesi.

Pada tahun 2017 terdapat beberapa kejadian yang menurunkan beberapa skor indikator-indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil. Menurunnya skor indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat sebesar 50,00 poin disebabkan oleh kejadian yang terekam dalam media surat kabar yakni kejadian pemecatan kepala dusun oleh kepala desa

Penurunan skor indikator tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya yang mengalami penurunan nilai indeks sebesar 50,00 poin disebabkan oleh kejadian Seleksi masuk SMAN I Atambua yang disinyalir banyak titipan para pejabat dan pemberitaan mengenai Madrasah Tsanawiah Mbay mengeluarkan 3 siswa korban dari kekerasan seksual.

Perkembangan Skor Indikator – Indikator  
Aspek Kebebasan Sipil IDI NTT Tahun 2016-2017

**Tabel 2**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2016-2017**

No.	Indikator	2016	2017
01	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	0,00
02	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
03	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00
04	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50,00
05	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00
06	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	87,50	90,63
07	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	80,00	85,00
08	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
09	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	87,50	37,50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100,00	75,00

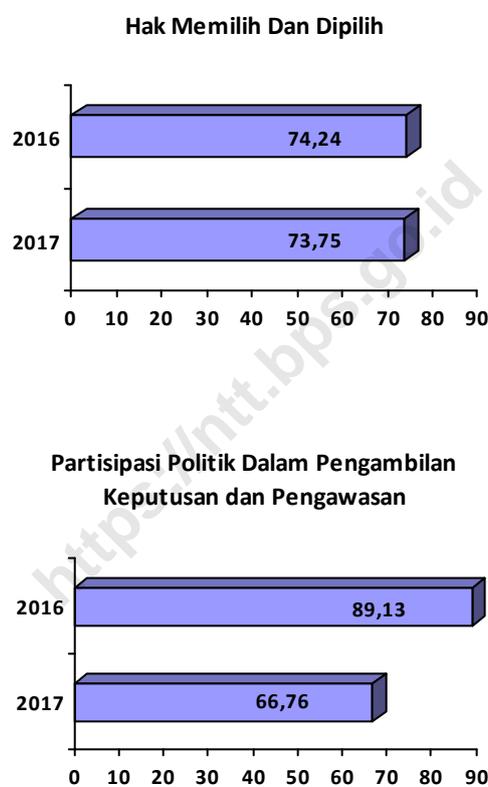
Sumber data: BPS Provinsi NTT

Penurunan skor indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya yang

mengalami penurunan nilai indeks sebesar 50,00 poin disebabkan oleh Masih terjadi kasus-kasus diskriminasi seperti pada penyandang disabilitas.

### Perkembangan Nilai Indeks Variabel- Variabel Aspek Hak- Hak Politik IDI NTT 2016-2017

**Grafik 4.**  
**Perkembangan Nilai Indeks Variabel Aspek Hak-hak Politik**  
**Tahun 2016-2017**



Sumber Data: BPS Provinsi NTT

Capaian nilai indeks kedua variabel dalam Aspek Hak-hak Politik di tahun 2017 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Variabel Hak Memilih dan Dipilih (variabel 5) menurun 0,49 poin. Empat indikator lainnya (indikator 11, 12, 13, dan 14) dalam variabel tersebut datanya konsisten dari tahun 2014 hingga tahun 2019 karena merujuk pada pemilu legislatif tahun 2014.

Masih dalam kurun waktu 2016-2017, Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (variabel 6) mengalami penurunan nilai

indeks cukup signifikan sebesar 23,37 poin yaitu dari nilai indeks sebesar 89,13 di tahun 2016 turun menjadi 66,76 pada tahun 2017. Ini berarti bahwa kinerja demokrasi dari sisi variabel tersebut menunjukkan pergeseran tingkatan demokrasi dari kategori baik menjadi kategori sedang.

Perkembangan Skor Indikator-Indikator pada  
Aspek Hak- Hak Politik IDI NTT Tahun 2016-2017

**Tabel 3**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Hak-hak Politik Tahun 2016-2017**

No.	Indikator	2016	2017
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	96,79	96,79
12	Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	75,14	75,14
14	Voters turnout	76,56	76,56
15	Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	35,90	30,77
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	78,26	31,52
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00

*Sumber data: BPS Provinsi NTT*

Nilai indeks Aspek Hak-hak politik untuk indikator 11, 12, 13, dan 14 merujuk pada pemilu legislatif tahun 2014 sehingga nilai indeksnya tetap hingga tahun 2019. Dengan demikian, IDI NTT tahun 2017 hanya mengukur indikator 15 untuk variabel Hal Memilih dan Dipilih, serta 2 indikator untuk aspek Hak-hak Politik (indikator 16 dan indikator 17).

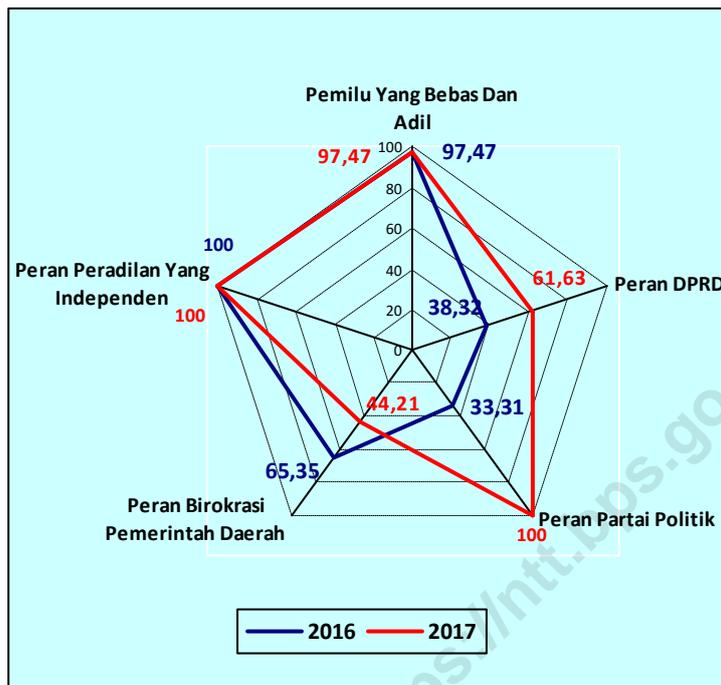
Indikator keterwakilan perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi di NTT, mengalami penurunan nilai indeks sebesar 5,13 poin pada tahun 2017, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam IDI NTT 2016, skor untuk indikator ini adalah

35,90, sedangkan dalam IDI NTT 2017, skornya sebesar 30,77. Skor sebesar 30,77 menunjukkan bahwa jumlah perempuan terpilih menjadi anggota DPRD masih sangat kecil dan menjadikan indikator 15 ini berada dalam kategori buruk. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa ada 5 kabupaten di NTT (Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Nagekeo) yang tidak memiliki perempuan terpilih dalam keanggotaan DPRD. Sedikitnya jumlah perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif dalam Pemilu oleh partai politik atau bisa juga karena kurangnya penghargaan para pemilih terhadap caleg perempuan sehingga rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan.

Penurunan aspek Hak-hak Politik di tahun 2017 juga disumbang oleh penurunan skor indikator 16 hampir setengahnya dibandingkan skor tahun 2016. Ini sejalan dengan jumlah kasus yang mengurangi skor indikator ini yakni, 5 kejadian pada tahun 2016 meningkat menjadi 15 kejadian pada tahun 2017. Beberapa kejadian yang mengurangi skor indikator 16 pada tahun 2017 terdiri dari kejadian hina polisi, leher pendemo dicekik; tujuh mahasiswa jadi korban kekerasan dari pihak kepolisian saat aksi demo di Kantor Gubernur NTT; menanam batang pisang di atas badan jalan sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan; dan lain sebagainya. Nilai indeks untuk aksi pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT tahun 2017 sebesar 100, menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat baik. Laporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui media surat kabar sebanyak 1.023 pengaduan (diluar pengaduan dalam bentuk hotline service) selama tahun 2017. Dari informasi ini, bisa disimpulkan bahwa masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara demokrasi telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik selama tahun 2016-2017.

## Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel Aspek Lembaga Demokrasi IDI NTT 2016-2017

**Grafik 5.**  
**Perkembangan Nilai Indeks Masing-masing Variabel**  
**Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016-2017**



*Sumber data: BPS Provinsi NTT*

Indeks lima Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 terbagi dalam tiga kategori, tiga variabel dalam kategori baik, satu variabel berkategori sedang, dan satu variabel berkategori buruk.

Variabel yang memiliki capaian indeks yang berkategori baik adalah variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Peradilan yang Independen, serta Peran Partai Politik masing-masing bernilai 97,47; 100; 100

Variabel yang memiliki capaian indeks yang berkategori sedang adalah variabel Peran DPRD, bernilai 61,63. Sedangkan variabel yang memiliki capaian nilai indeks yang berkategori buruk adalah Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

nilai indeks 100 selama tahun 2016-2017, pada variabel Peran Peradilan yang Independen menunjukkan bahwa independensi peran peradilan di Provinsi NTT dalam bingkai indeks demokrasi telah berhasil dilakukan. Meskipun demikian, hal ini tidak jauh melihat apakah hukum dalam peradilan sudah ditegakkan dengan seadil-adilnya sehingga nilai indeks ini hanya melihat independensi lembaga peradilan dalam perspektif indeks demokrasi.

Dari Grafik 5 menunjukkan bahwa Kinerja Birokrasi Pemerintah di Provinsi NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan 21,14 poin menjadi nilai indeks 44,21 (kategori buruk), padahal tahun sebelumnya berada dalam capaian indeks dengan kategori sedang yaitu sebesar 65,35. Penurunan nilai indeks ini dikarenakan semakin bertambahnya penyalagunaan wewenang oleh pejabat dan berkurangnya upaya pemerintah dalam memperbaharui informasi APBD yang pada hakekatnya merupakan bentuk transparansi anggaran.

Hal lain yang dapat digambarkan dalam aspek Lembaga Demokrasi ini adalah variabel Peran DPRD dan Peran Partai Politik. Dari grafik 5 selama tahun 2016-2017 sudah mencapai indeks kategori sedang dan bahkan baik, terlihat pada tahun 2017 meningkat signifikan 23,31 poin menjadi 61,63 dari nilai indeks 38,32 pada tahun 2016. Peningkatan kinerja DPRD Provinsi NTT sudah mulai membaik dengan sudah adanya peraturan daerah (perda) hak inisiatif DPRD dan rekomendasi kepada eksekutif sebagai fungsi pengawasan dalam pemerintahan. Yang cukup menarik adalah pada variabel Peran Partai Politik yang pada tahun 2016 berada pada kategori buruk dengan nilai indeks sebesar 33,31, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2017 yaitu sudah di kategori baik dengan angka indeks yang sempurna sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik yang ada di Provinsi NTT sudah melakukan pendidikan politik (terkait etika politik, hak dan kewajiban bernegara, serta berpartisipasi yang berkualitas), juga partai politik telah melakukan kaderisasi dengan bantuan dana dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga terus berupaya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik.

Perkembangan Skor Indikator- indikator  
Aspek Lembaga Demokrasi IDI NTT 2016 - 2017

**Tabel 4.**  
**Nilai Skor Indikator-indikator**  
**Aspek Lembaga Demokrasi Tahun 2016-2017**

No.	Indikator	2016	2017
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	94,94	94,94
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	46,33	74,97
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	50,00	57,14
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0,00	17,86
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	28,57	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	75,97	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	73,68	86,84
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	58,33	8,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber data: BPS Provinsi NTT

Aspek Lembaga Demokrasi yang terukur dalam 11 indikator menempati nilai indeks dalam rentang skor 8 - 100 pada tahun 2017. Indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi yang skornya menurun hingga skor 8 adalah indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator 26) sedangkan indikator dengan skor 100 adalah indikator Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu (indikator 18), Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (indikator 23), Persentase perempuan pengurus partai politik (indikator 24), indikator keputusan hakim yang kontroversial (indikator 27) dan indikator penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi (indikator 28). Khusus untuk indikator 18 dan 19, variabel pemilu yang bebas dan adil masih merujuk pada pemilu 2014 jadi skor untuk indikator tersebut konstan hingga tahun 2019.

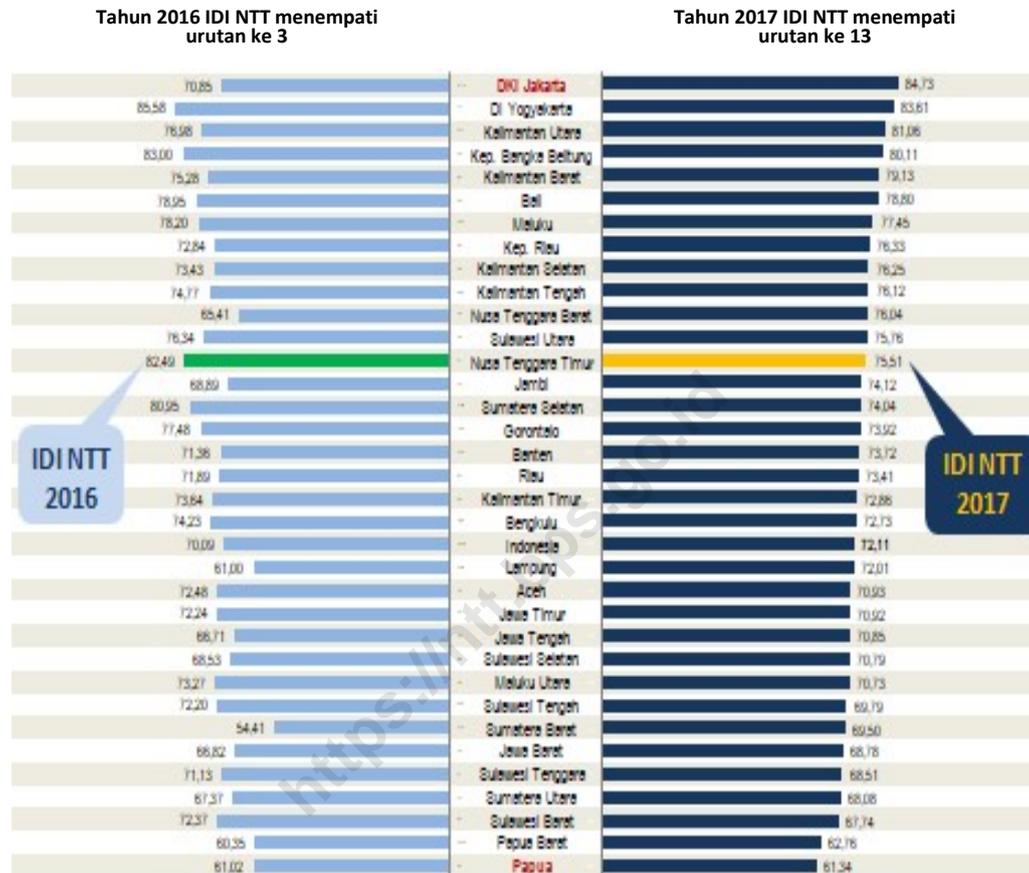
Perkembangan indikator-indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2016-2017, yang menarik untuk menjadi perhatian adalah tiga indikator yang masih berada dalam kinerja demokrasi dengan kategori buruk diantaranya, perda inisiatif DPRD; rekomendasi DPRD terhadap eksekutif dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Dengan cukup banyaknya indikator yang masih butuh perhatian lebih karena masih dalam kinerja demokrasi kategori buruk, menjadi sebuah peringatan, bahwa keberhasilan kebebasan sipil dan Aspek Hak-hak Politik tidak didukung adanya upaya perbaikan pada kinerja lembaga demokrasi sebagai institusi yang akan menjaga kinerja demokrasi agar tidak menjadi anarki.

Dua dari tiga indikator dengan skor yang masih dalam kategori buruk adalah merupakan bagian dari variabel peran DPRD. Hal ini perlu menjadi koreksi bagi DPRD sebagai lembaga legislatif penyelenggara demokrasi. Tahun 2017, skor indikator persentase perda inisiatif yang berasal dari DPRD sebesar 57,14. Meskipun pada skor indikator ini masih dalam kategori buruk, sesungguhnya terjadi peningkatan karena sebelumnya di tahun 2016 skor indikator tersebut 50,00. Untuk fungsi pengawasan DPRD yang diukur melalui skor indikator jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, sudah mulai terlaksana dengan baik di tahun 2017 yang ditunjukkan dengan skor indeks indikator tersebut sebesar 17,86 sedangkan di tahun sebelumnya nilai indeksnya nol. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan DPRD sudah terlaksana. Dalam aspek ini, peran DPRD sangat penting untuk menciptakan institusi yang demokratis terutama dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Kinerja lembaga demokrasi lainnya yang perlu untuk ditingkatkan ke depannya adalah peran pemerintah daerah. Nilai skor indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah di tahun 2017 hanya sebesar 8,33 perlu kiranya pemerintah daerah meningkatkan transparansi melalui website Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang sudah terintegrasi dengan website Pemda Provinsi NTT. Pemerintah daerah harus terus mengupdate data/konten TPAD sebagai wujud keterbukaan terhadap publik terkait penggunaan anggaran pemerintah.

## Keterbandingan IDI NTT Tahun 2016-2017

**Grafik 6. Keterbandingan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2017**



Indikator-indikator dan penghitungan IDI di masing-masing provinsi bisa saja dibandingkan antar provinsi. Jika dilihat dari Grafik 6, nilai IDI NTT pada tahun 2016 telah mencapai nilai indeks sebesar 82,49 dan berada pada urutan ke tiga setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pada tahun 2017, nilai indeks mencapai 75,51 dan berada pada urutan ke tiga belas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2016-2017 IDI NTT mengalami penurunan nilai indeks (sebesar 6,98 poin) sehingga kinerja demokrasi mengalami penurunan yang ditandai dengan pergeseran dari kategori baik menjadi kategori

sedang, yang mengakibatkan penurunan urutan/peringkat IDI dalam keterbandingan dengan provinsi lain dari urutan kedelapan menjadi urutan ke tiga belas.

<https://ntt.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 1. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2009

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Kalteng	77.63	98.45	60.50	78.69
2	Riau	75.85	93.14	65.40	70.68
3	DKI Jakarta	73.91	91.65	52.20	86.09
4	Kep. Riau	73.61	96.22	59.47	67.62
5	Gorontalo	73.50	96.05	56.39	73.32
6	Sumsel	72.52	95.42	56.07	69.83
7	Kalbar	72.38	98.29	53.46	69.85
8	Kaltim	72.31	98.22	54.78	67.57
9	NTT	71.64	95.55	51.46	73.63
10	Jawa Barat	71.07	85.84	68.48	56.61
11	Jambi	71.00	95.86	50.41	72.43
12	Sulut	70.94	92.23	58.50	63.91
13	Bali	70.35	93.97	49.82	73.24
14	Maluku	69.07	92.77	52.05	66.30
15	Sulbar	67.99	93.82	53.09	59.15
16	Banten	67.98	95.46	49.47	62.83
17	DIY	67.55	92.15	52.52	60.48
18	Lampung	67.47	90.57	51.81	63.27
19	Maluku Barat	67.21	93.61	46.30	67.23
20	Babel	67.01	96.51	48.29	59.65
21	Kalsel	66.63	68.24	62.63	70.95
22	Jawa Tengah	66.45	86.48	51.85	64.43
23	NAD	66.29	64.42	70.39	62.13
24	Sulteng	66.02	98.51	45.90	57.14
25	Bengkulu	64.76	94.26	54.03	44.70
26	Sultra	64.29	94.66	43.97	58.37
27	Papua	63.80	92.83	43.84	58.97
28	Papua Barat	63.06	93.14	37.09	66.48
29	Jawa Timur	62.49	83.30	50.96	54.64
30	Sulsel	61.48	82.94	42.36	64.88
31	Sumbar	60.29	63.06	53.57	67.48
32	Sumut	60.20	84.16	41.26	60.14
33	NTB	58.12	68.05	47.50	62.48
<b>INDONESIA</b>		<b>67.30</b>	<b>86.97</b>	<b>54.60</b>	<b>62.72</b>

Tabel 2. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77.44	92.46	56.19	92.30
2	DIY	74.33	91.24	55.96	82.25
3	Sumsel	73.65	100.00	55.17	69.85
4	Kaltim	73.04	97.79	53.89	72.34
5	Bali	72.44	94.10	51.52	78.43
6	NTT	72.05	95.55	55.89	68.15
7	Riau	71.45	91.02	47.19	85.39
8	Kalteng	71.10	94.51	56.05	65.57
9	Kalsel	70.94	67.74	72.66	72.25
10	Bengkulu	70.78	94.40	64.35	51.29
11	Maluku	69.51	96.22	48.12	69.89
12	Kalbar	69.32	99.17	45.19	70.11
13	Lampung	67.80	94.39	53.90	56.44
14	Papua Barat	67.75	99.84	44.24	64.73
15	Sulbar	67.57	94.48	47.22	66.06
16	Sulteng	66.63	92.19	51.82	58.01
17	Babel	65.94	85.95	48.44	68.57
18	Sulut	65.94	92.98	44.90	65.34
19	Jambi	65.88	85.15	48.14	69.81
20	NAD	65.36	69.98	62.63	63.87
21	Gorontalo	64.97	82.55	51.72	63.90
22	Sumut	63.45	76.64	57.42	56.45
23	Jawa Tengah	63.42	84.83	46.29	63.70
24	Sumbar	63.04	58.34	63.90	67.59
25	Kep. Riau	62.89	87.04	39.80	69.20
26	Banten	60.60	83.17	38.70	66.99
27	Papua	60.26	90.72	31.76	67.22
28	Maluku Barat	59.92	92.59	30.82	65.06
29	Jawa Barat	59.41	74.41	46.74	60.67
30	NTB	58.13	67.22	46.48	65.19
31	Sulsel	56.67	78.19	32.40	68.17
32	Jawa Timur	55.12	78.48	42.06	46.47
33	Sultra	54.79	83.71	30.46	57.06
<b>INDONESIA</b>		<b>63.17</b>	<b>82.53</b>	<b>47.87</b>	<b>63.11</b>

Tabel 3. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,81	89,94	58,32	93,50
2	Kalteng	76,28	92,56	54,73	90,04
3	Kalbar	74,86	97,15	49,34	87,38
4	Bali	74,20	95,44	50,08	85,79
5	Lampung	74,08	93,14	61,15	70,64
6	NTT	72,34	96,79	47,56	80,97
7	DIY	71,67	87,22	52,35	82,81
8	Bengkulu	71,36	94,10	59,47	61,63
9	Sulut	71,19	98,44	52,86	66,03
10	Kep. Riau	70,78	87,15	56,00	73,66
11	Riau	70,65	83,12	52,90	83,18
12	Jambi	70,46	91,62	46,27	82,27
13	Maluku	68,38	90,70	46,14	75,61
14	Sumsel	67,92	84,05	49,41	77,05
15	Banten	67,37	80,41	44,57	87,18
16	Babel	67,13	88,27	47,11	72,33
17	Kalsel	66,47	56,33	64,25	82,76
18	Kaltim	66,37	91,84	45,12	68,10
19	Sulbar	66,36	94,80	42,65	68,26
20	Jawa Barat	66,18	78,92	46,42	81,55
21	Sumut	66,15	79,23	59,47	60,31
22	Jawa Tengah	65,59	84,05	46,29	73,04
23	Sulsel	65,31	80,97	39,33	86,87
24	Sumbar	65,02	60,57	59,21	79,83
25	Sulteng	64,00	92,23	37,01	71,36
26	Gorontalo	62,77	81,80	44,36	68,08
27	Papua Barat	61,78	93,59	43,99	50,03
28	Maluku Barat	59,17	90,04	32,61	62,56
29	Papua	59,05	87,73	29,43	70,04
30	Sultra	57,56	85,81	29,18	67,11
31	Jawa Timur	55,98	71,58	40,32	61,23
32	NAD	55,54	58,65	47,90	63,77
33	NTB	54,49	55,45	49,60	61,06
<b>INDONESIA</b>		<b>65,48</b>	<b>80,79</b>	<b>47,54</b>	<b>74,72</b>

Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2012

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	77,72	88,11	62,52	88,81
2	Sulut	76,50	95,64	58,65	80,77
3	Sumsel	73,17	93,26	55,21	76,42
4	DIY	72,96	87,39	55,52	82,52
5	NTT	72,67	91,06	50,89	84,15
6	Lampung	72,26	94,14	50,60	79,16
7	Bali	71,75	94,18	45,00	86,01
8	Kaltim	71,23	97,16	51,69	69,68
9	Babel	69,37	83,09	51,21	80,97
10	Jambi	68,81	86,23	46,60	82,18
11	Sulsel	68,55	87,07	43,74	84,66
12	Riau	67,00	80,21	47,16	81,89
13	Maluku Barat	66,83	88,15	50,13	66,55
14	Kalteng	65,78	68,44	51,05	85,82
15	Papua Barat	65,70	94,42	45,74	61,27
16	Kep. Riau	65,61	82,68	49,98	68,95
17	Kalbar	65,38	92,37	37,18	76,23
18	Banten	65,29	79,20	51,03	70,42
19	Sulteng	64,97	93,43	37,65	72,55
20	Jawa Tengah	63,79	75,03	46,29	77,46
21	Sulbar	63,65	88,67	35,92	76,22
22	Bengkulu	61,70	77,76	48,93	61,79
23	Kalsel	61,13	49,51	52,59	89,33
24	Sumbar	60,82	57,10	50,85	81,32
25	Papua	60,71	91,11	32,99	66,50
26	Maluku	59,68	76,05	45,08	62,27
27	Gorontalo	59,37	73,25	50,76	55,59
28	Sumut	58,51	73,85	49,82	53,01
29	NTB	57,97	58,31	49,60	70,85
30	Sultra	57,26	91,39	29,50	58,44
31	Jawa Barat	57,05	65,93	46,58	62,51
32	Jawa Timur	54,99	80,97	36,17	52,22
33	NAD	54,02	60,16	47,16	57,21
<b>INDONESIA</b>		<b>62,63</b>	<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>

Tabel 5. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	Sumut	58,80	73,65	49,50	54,90
2	Sumsel	67,12	91,45	50,32	63,22
3	Sumbar	54,11	54,88	38,97	77,17
4	Sulut	73,11	92,44	62,55	65,56
5	Sultra	52,61	84,32	28,95	50,32
6	Sulteng	64,50	90,03	36,78	76,44
7	Sulsel	65,20	81,30	50,62	68,10
8	Sulbar	64,02	88,51	44,05	64,94
9	Riau	68,37	77,71	52,19	82,32
10	Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26
11	Papua	60,92	90,21	31,37	71,01
12	NTT	73,29	95,59	58,83	68,23
13	NTB	57,22	59,68	49,60	66,24
14	NAD	63,56	71,78	48,59	76,97
15	Maluku Barat	64,06	83,67	48,94	63,40
16	Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95
17	Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58
18	Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21
19	Kaltim	68,13	92,14	55,36	58,20
20	Kalteng	64,15	81,89	50,69	63,21
21	Kalsel	63,71	58,03	56,35	82,54
22	Kalbar	67,52	97,54	49,36	58,61
23	Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10
24	Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89
25	Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05
26	Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34
27	Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22
28	DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69
29	DIY	72,36	90,78	50,65	83,69
30	Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28
31	Banten	69,79	81,39	51,03	85,00
32	Bali	72,22	92,55	52,87	77,38
33	Babel	68,79	85,16	50,60	77,09
<b>INDONESIA</b>		<b>63,72</b>	<b>79,00</b>	<b>46,25</b>	<b>72,14</b>

Tabel 6. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2014

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97
2	Sulut	83,94	93,56	80,89	76,68
3	DIY	82,71	86,25	76,07	88,82
4	Kalbar	80,58	98,44	63,12	85,84
5	Kalteng	79,00	92,93	66,42	81,48
6	Kaltim	77,77	93,28	70,42	69,94
7	Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77
8	Sulbar	76,69	90,22	63,64	80,39
9	Bali	76,13	92,16	61,27	79,56
10	Banten	75,50	81,10	63,68	87,22
11	Babel	75,32	89,80	56,48	87,01
12	Sulsel	75,30	86,27	73,99	63,58
13	Sumsel	74,82	86,09	63,57	78,53
14	Sulteng	74,36	86,56	59,01	83,42
15	Gorontalo	73,82	82,19	63,67	79,41
16	Maluku	72,72	90,85	60,03	70,09
17	NAD	72,29	69,76	63,94	88,73
18	Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16
19	Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66
20	Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89
21	Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48
22	Kalsel	70,84	58,43	76,45	77,53
23	Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54
24	Sultra	70,13	90,89	53,20	70,92
25	NTT	68,81	85,92	65,13	53,12
26	Riau	68,40	74,35	59,74	74,69
27	Kep. Riau	68,39	82,47	58,35	66,61
28	Sumut	68,02	79,86	61,97	62,75
29	Maluku Barat	67,90	76,90	60,61	68,16
30	Papua Barat	65,65	97,93	39,29	66,93
31	Sumbar	63,99	47,21	61,82	88,56
32	NTB	62,62	58,73	62,08	68,38
33	Papua	62,15	85,69	42,51	63,75
<b>INDONESIA</b>		<b>73,04</b>	<b>82,62</b>	<b>63,72</b>	<b>75,81</b>

Tabel 7. Aspek Indeks Demokrasi di 34 Provinsi ,Tahun 2015

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	83,26
2	DIY	83,19	90,41	77,98	82,38
3	Kaltim	81,24	93,07	82,74	63,99
4	Kalut	80,16	98,10	83,65	52,05
5	Bali	79,83	94,42	77,42	65,31
6	Sumsel	79,81	96,06	78,79	61,00
7	Sulut	79,40	86,71	77,92	72,53
8	NTT	78,47	93,19	71,69	70,73
9	Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	81,39
10	Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81
11	Sulteng	76,67	94,60	68,85	66,53
12	Kalbar	76,40	96,81	65,57	67,95
13	Kalsel	74,76	54,15	85,77	83,17
14	Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61
15	Kalteng	73,46	85,07	68,31	67,05
16	Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,37
17	Babel	72,31	81,25	66,95	69,60
18	Jambi	70,68	75,89	62,12	77,72
19	Kep. Riau	70,26	80,16	65,01	66,13
20	Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48
21	Sultra	69,44	91,14	56,95	61,99
22	Sumut	69,01	82,02	62,17	63,52
23	Banten	68,46	74,28	63,72	68,66
24	Sulbar	68,25	81,88	61,16	62,37
25	Sulsel	67,90	69,38	64,25	71,84
26	NAD	67,78	74,81	63,98	64,97
27	Sumbar	67,46	52,99	69,77	82,01
28	Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74
29	Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43
30	Riau	65,83	66,46	66,61	63,80
31	NTB	65,08	51,59	61,11	88,36
32	Maluku Barat	61,52	73,53	61,00	47,25
33	Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81
34	Papua	57,55	82,72	41,81	50,87
<b>INDONESIA</b>		<b>72,82</b>	<b>80,30</b>	<b>70,63</b>	<b>66,87</b>

Tabel 8. Aspek Indeks Demokrasi di 34 Provinsi ,Tahun 2016

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DIY	85,58	90,00	81,59	86,37
2	Babel	83,00	87,65	81,09	80,20
3	NTT	82,49	96,25	81,68	66,46
4	Sumsel	80,95	91,17	81,94	66,53
5	Bali	78,95	96,94	69,60	71,18
6	Maluku	78,20	87,17	76,18	70,13
7	Gorontalo	77,48	82,35	75,54	74,42
8	Kalut	76,98	100,00	66,64	64,48
9	Sulut	76,34	96,31	70,42	60,62
10	Kalbar	75,28	83,29	75,70	64,54
11	Kalteng	74,77	84,98	70,66	68,43
12	Bengkulu	74,23	85,14	63,84	77,01
13	Kaltim	73,64	78,25	78,35	60,36
14	Kalsel	73,43	61,04	83,58	72,89
15	Maluku Barat	73,27	92,27	61,79	67,59
16	Kep. Riau	72,84	85,43	71,28	59,48
17	NAD	72,48	92,92	63,94	60,33
18	Sulbar	72,37	82,89	69,02	64,47
19	Jawa Timur	72,24	73,73	76,49	63,63
20	Sulteng	72,20	80,39	67,89	68,76
21	Riau	71,89	71,78	77,98	62,34
22	Banten	71,36	83,47	68,30	60,99
23	Sultra	71,13	88,07	55,51	74,66
24	DKI Jakarta	70,85	81,11	67,54	63,19
25	Jambi	68,89	84,39	65,63	54,58
26	Sulsel	68,53	75,54	61,51	70,86
27	Sumut	67,37	82,71	62,29	56,13
28	Jawa Barat	66,82	73,37	72,34	49,79
29	Jawa Tengah	66,71	66,06	67,24	66,69
30	NTB	65,41	65,06	62,08	71,13
31	Papua	61,02	92,15	41,13	53,45
32	Lampung	61,00	60,49	59,32	64,31
33	Papua Barat	60,35	93,67	38,05	53,85
34	Sumbar	54,41	51,01	54,33	58,82
<b>INDONESIA</b>		<b>70,09</b>	<b>76,45</b>	<b>70,11</b>	<b>62,05</b>

Tabel 9. Aspek Indeks Demokrasi di 34 Provinsi ,Tahun 2017

Kode Provinsi	Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
			Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-Lembaga Demokrasi
1	DKI Jakarta	84,73	87,73	80,86	87,12
2	D.I.Yogyakarta	83,61	93,25	82,31	73,55
3	Kalimantan Utara	81,06	98,57	68,54	78,93
4	Kep. Bangka Belitung	80,11	83,07	82,3	72,89
5	Kalimantan Barat	79,13	97,15	76,36	60,85
6	Bali	78,8	95,51	66,8	76,85
7	Maluku	77,45	81,78	74,85	76,15
8	Kepulauan Riau	76,33	90,84	71,45	65,82
9	Kalimantan Selatan	76,25	60,16	81,09	88,79
10	Kalimantan Tengah	76,12	95,58	56,69	82,5
11	Nusa Tenggara Barat	76,04	79,4	62,08	93,98
12	Sulawesi Utara	75,76	90,87	72,12	62,54
13	Nusa Tenggara Timur	75,51	79,69	69,75	79,39
14	Jambi	74,12	86,81	62,08	77,27
15	Sumatera Selatan	74,04	90,83	63,9	69,03
16	Gorontalo	73,92	85,3	68,18	68,73
17	Banten	73,72	85,16	63,87	74,98
18	Riau	73,41	82,03	66,57	73,41
19	Kalimantan Timur	72,86	83,33	67,18	68,72
20	Bengkulu	72,73	88,51	59,42	74,03
21	Lampung	72,01	74,12	67,2	77
22	Aceh	70,93	87,27	63,94	61,47
23	Jawa Timur	70,92	78,98	60,98	76,57
24	Jawa Tengah	70,85	69,07	67,24	78,82
25	Sulawesi Selatan	70,79	77,48	64,58	72,23
26	Maluku Utara	70,73	90,19	65,84	54,02
27	Sulawesi Tengah	69,79	90,04	55,88	66,44
28	Sumatera Barat	69,5	61,66	61,08	92,72
29	Jawa Barat	68,78	73,61	71,02	59,16
30	Sulawesi Tenggara	68,51	77,66	60,49	69,74
31	Sumatera Utara	68,08	74,75	62,29	68,87
32	Sulawesi Barat	67,74	73,56	60,84	71,39
33	Papua Barat	62,76	92,42	39,05	63,14
34	Papua	61,34	89,09	42,16	56,91
<b>INDONESIA</b>		<b>72,11</b>	<b>78,75</b>	<b>66,63</b>	<b>72,49</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik  
Provinsi NTT**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)

Web site: <http://ntt.bps.go.id>

ISSN 2528-2131



9 772528 213002 >